

ANALISIS FAKTOR PENGARUH PENYERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1990-2020

Syafila Roza Azzahra, [Jalu Aji Prakoso]

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
syafilaroza31@gmail.com, [jaluaji@untidar.ac.id]

Abstract

The aim of this study was to determine the long-term and short-term relationship of the factors that affect the absorption of labor in the Special Region of Yogyakarta Province. The method used is the Error Correction Model (ECM). The type of data used is time series data for 1990-2020. The results show that in the long term the variable of the provincial minimum wage has a significant positive effect, the population variable has an insignificant negative effect, and the investment variable has a significant negative effect on employment. Meanwhile, in the short term, the variable of the provincial minimum wage has a significant positive effect, the population variable has a non-significant positive effect, and the investment variable has a significant positive effect on employment.

Keywords: *Investment, Population, Employment, Provincial Minimum Wage*

1. Pendahuluan

Permasalahan pembangunan ekonomi merupakan salah satu kendala yang dihadapi Negara Indonesia sebagai negara berkembang. Pembangunan ekonomi merupakan tujuan negara yang ingin dicapai guna memajukan perekonomian Negara Indonesia. Pembangunan ekonomi dapat menjadi tolak ukur bagi peningkatan pembangunan suatu daerah dari bermacam-macam sektor ekonomi yang dapat digunakan sebagai gambaran tingkat perubahan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi memiliki hubungan dengan proses produksi dalam kegiatan perekonomian, peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat ditandai dengan meningkatnya *output* produksi dan

pendapatan. Dalam proses menghasilkan *output* produksi, diperlukan tenaga kerja sebagai pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan. Kualitas tenaga kerja penting untuk diperhatikan karena memiliki pengaruh secara langsung terhadap kualitas *output* produksi yang akan menentukan tingkat pembangunan ekonomi.

Persoalan ketenagakerjaan ialah salah satu masalah penting yang perlu dibenahi di suatu negara berkembang seperti di Indonesia. Perkembangan pasar global sedang berkembang pesat saat ini, sehingga tenaga kerja yang berkualitas sangat penting memainkan peran penting yang dibutuhkan oleh beberapa negara untuk memajukan perekonomian. Kesempatan kerja ialah faktor penting untuk

mendorong perkembangan perekonomian nasional. Dengan adanya pekerjaan, pekerja mendapatkan penghasilan berupa upah atau gaji. Di Indonesia, peraturan pengupahan provinsi mengacu pada upah minimum, yakni Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah tiap provinsi ditentukan oleh pemerintah melalui kebijakan upah minimum yang diharapkan diterima oleh pekerja. Harapannya dengan upah minimum yang lebih tinggi, mereka akan mampu memiliki kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Seiring bertumbuhnya perekonomian, masyarakat berharap dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan menambah angkatan kerja. Dari sisi pendapatan riil perkapita, pertumbuhan ekonomi

dapat berdampak pada distribusi pendapatan.

Tingginya penyerapan tenaga kerja dapat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia khususnya Provinsi DIY, yang nantinya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan meningkatnya angka pengangguran akibat menurunnya penyerapan tenaga kerja dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya, peningkatan beban dalam masyarakat, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Pada penelitian ini, jumlah penduduk bekerja digunakan sebagai indikator penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Bekerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2020

<i>Tahun</i>	<i>Penduduk Bekerja (Jiwa)</i>	<i>Tahun</i>	<i>Penduduk Bekerja (Jiwa)</i>	<i>Tahun</i>	<i>Penduduk Bekerja (Jiwa)</i>
1990	1502690	2000	1540004	2010	1775148
1991	1540230	2001	1592097	2011	1798595
1992	1556842	2002	1644190	2012	1867708
1993	1512323	2003	1658103	2013	1847070
1994	1463926	2004	1701802	2014	1956043
1995	1415529	2005	1757702	2015	1891218
1996	1453218	2006	1750575	2016	2042400
1997	1493940	2007	1774245	2017	2053168
1998	1450952	2008	1892205	2018	2118392
1999	1524870	2009	1895648	2019	2134750
				2020	2126316

Sumber: Statistik Indonesia, 1990-2020

Berdasar data Tabel 1. jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berusia diatas 15 tahun yang bekerja menunjukkan angka yang berfluktuasi, namun

cenderung semakin meningkat terutama pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang mendapat pekerjaan, sehingga

tingkat penyerapan tenaga kerja juga semakin baik dan meningkat. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja ini juga dapat disebabkan oleh semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang dibuka. Namun menurun sebanyak 8434 jiwa tahun 2020 akibat adanya Covid-19 yang mengakibatkan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaannya.

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dipengaruhi oleh upah yang ditawarkan oleh perusahaan yang digunakan para tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan upah yang ditetapkan pada sektor formal adalah kebijakan upah minimum, yakni standar minimal upah yang harus dibayarkan organisasi kepada karyawan ditentukan berdasarkan tingkat KHL minimum yang berlaku di daerah tertentu.

Upah minimum merupakan penerimaan bulanan minimal yang digunakan sebagai penggantian dari pemberi kerja kepada pegawai untuk hasil kerja yang dilakukan, gaji minimal dikatakan dalam bentuk uang tunai yang diputuskan berdasarkan kesepakatan atau aturan dan dibayar atas ide kesepakatan potongan antara perusahaan dengan tenaga kerja termasuk tunjangan (Devanto dan Putu, 2011). Semakin tinggi upah yang ditawarkan, semakin tinggi pula penawaran atas tenaga kerja yang akan memicu orang-orang untuk bekerja sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi lebih banyak. Namun semakin tinggi upah yang ditawarkan dapat menurunkan harga barang sebab pengeluaran perusahaan atas biaya *output* juga meningkat. Sehingga biaya produksi harus ditekan dengan mengurangi tenaga kerja.

Tabel 2. Besar Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2020

<i>Tahun</i>	<i>UMP</i>	<i>Tahun</i>	<i>UMP</i>	<i>Tahun</i>	<i>UMP</i>
1990	Rp 55.750	2000	Rp194.500	2010	Rp 745.694
1991	Rp 63.400	2001	Rp237.500	2011	Rp 808.000
1992	Rp 69.850	2002	Rp321.800	2012	Rp 892.660
1993	Rp 76.500	2003	Rp360.000	2013	Rp 947.114
1994	Rp 86.750	2004	Rp365.000	2014	Rp 988.500
1995	Rp 90.250	2005	Rp400.000	2015	Rp 988.500
1996	Rp 96.000	2006	Rp460.000	2016	Rp1.182.510
1997	Rp106.500	2007	Rp500.000	2017	Rp1.337.645
1998	Rp122.500	2008	Rp586.000	2018	Rp1.454.154
1999	Rp130.000	2009	Rp700.000	2019	Rp1.570.923
				2020	Rp1.704.608

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021

Data Tabel 2. dapat dilihat besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat memicu

masyarakat untuk bekerja dan mencari kerja yang dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja. Sehingga dengan semakin meningkatnya UMP akan

meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja. UMP yang meningkat dapat menjadi bukti bahwa kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

Faktor pengaruh penyerapan tenaga kerja lainnya yakni jumlah penduduk. Dalam pembangunan ekonomi, penduduk berfungsi

sebagai tenaga kerja sehingga apabila jumlah penduduk semakin meningkat per tahunnya maka jumlah tenaga kerja juga ikut meningkat, namun apabila tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah lapangan kerja maka akan menimbulkan berbagai masalah kependudukan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2020.

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1990	3020837	2000	3297426	2010	3458192
1991	3044465	2001	3323740	2011	3509997
1992	3068004	2002	3326418	2012	3552462
1993	3096064	2003	3327014	2013	3594854
1994	3151295	2004	3334825	2014	3637116
1995	3171924	2005	3339614	2015	3679176
1996	3191723	2006	3347182	2016	3720912
1997	3245156	2007	3354675	2017	3762167
1998	3261035	2008	3379131	2018	3802872
1999	3285719	2009	3426637	2019	3842932
				2020	3882288

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021

Berdasarkan Tabel 3. dilihat jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meningkat pada setiap tahunnya, meskipun tidak terjadi peningkatan secara signifikan. Peningkatan jumlah penduduk ini dapat berpengaruh terhadap keadaan tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga dapat dipengaruhi oleh investasi PMA atau PMDN. Investasi yang masuk ke daerah dapat meningkatkan modal dalam

kegiatan moneter yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbesar kapasitas produksi. Apabila investasi berlangsung secara terus-menerus maka penawaran dapat meningkat melalui stok modal yang ada, yang nantinya akan meningkatkan output yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian daerah, semakin tinggi modal (modal) dimiliki daerah, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Tabel 4. Besaran Investasi (Asing dan Dalam Negeri) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2020 (Juta)

Tahun	Investasi (PMA + PMDN)	Tahun	Investasi (PMA + PMDN)	Tahun	Investasi (PMA + PMDN)
1990	Rp 1.045.663	2000	Rp 2.878.574	2010	Rp 4.580.970
1991	Rp 1.448.790	2001	Rp 2.976.214	2011	Rp 6.423.578
1992	Rp 1.122.340	2002	Rp 2.921.496	2012	Rp 7.056.066
1993	Rp 1.048.812	2003	Rp 3.650.396	2013	Rp 8.067.770
1994	Rp 1.432.512	2004	Rp 3.921.236	2014	Rp 9.524.400
1995	Rp 1.354.881	2005	Rp 4.049.742	2015	Rp 11.223.403
1996	Rp 1.852.587	2006	Rp 4.042.666	2016	Rp 12.077.661
1997	Rp 2.124.087	2007	Rp 4.079.700	2017	Rp 12.853.974
1998	Rp 2.214.623	2008	Rp 4.221.888	2018	Rp 20.075.671
1999	Rp 2.333.200	2009	Rp 4.390.645	2019	Rp 26.593.957
				2020	Rp 26.973.410

Sumber: BKPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021

Berdasar Tabel 4. dapat dilihat bahwa investasi baik asing maupun dalam negeri meningkat. Dibuktikan dengan infrastruktur dan bangunan di Provinsi DIY yang semakin meningkat dan membaik, kualitas dan kuantitas. Begitupula dengan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga semakin meningkat pada setiap tahunnya, sehingga menarik para investor untuk menanamkan modalnya.

Menurut uraian diatas, maka variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Investasi yang masuk ke daerah dapat meningkatkan modal dalam kegiatan moneter tahun 1990-2020. Sehingga penelitian ini dilakukan guna mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel independen adalah Upah Minimum Provinsi, Jumlah Penduduk, Investasi (PMA+PMDN). Variabel dependen yang digunakan adalah Jumlah Penduduk Bekerja sebagai indikator dari penyerapan tenaga kerja.

2. Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah berbagai pekerjaan yang tersedia dari berbagai orang bekerja yang dapat diminta dengan sumber daya. Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan. Tenaga kerja yang terserap memiliki bakat dan kemampuan yang diinginkan dengan sumber daya yang digunakan perusahaan (Feriyanto, 2014). Penyerapan tenaga kerja juga dapat dikenal sebagai keseimbangan pada penawaran dan permintaan, di mana tingkat keseimbangan dan penggunaan keseimbangan ditentukan dengan penggunaan penawaran dan permintaan. Penyerapan tenaga kerja di setiap sektor formal perekonomian membutuhkan keahlian khusus yang berbeda-beda. Ketenagakerjaan adalah masalah yang terus menjadi perhatian utama dari waktu ke waktu. Masalah ini sangat penting untuk dipikirkan sebab sangat

terkait dengan pengangguran dan kemiskinan. Dalam masalah ketenagakerjaan ini menunjukkan bahwa, semakin rendah tingkat pengangguran, semakin sedikit tingkat kemiskinan. Salah satu indikator pemenuhan perbaikan ekonomi dengan bantuan tenaga kerja adalah banyaknya pekerja yang diserap maka pertumbuhan ekonomi.

2.2 Upah Minimum Provinsi

Upah merupakan penerimaan pendapatan dalam bentuk uang oleh karyawan yang meliputi upah atau gaji, tunjangan transportasi, uang makan, tunjangan hari raya, dan tunjangan lainnya yang memiliki sifat tidak rutin dan berbentuk natural (BPS, 2008). Tujuan penetapan UMP adalah melindungi daya beli masyarakat akibat inflasi.

Upah minimum merupakan standar minimal dalam bentuk uang digunakan pengusaha membayar gaji pekerja setelah melakukan pekerjaannya. Tujuannya memperoleh upah untuk memenuhi kebutuhan guna meningkatkan taraf hidup seseorang. Tingkat upah pekerja perlu untuk ditingkatkan agar kualitas hidup para pekerja beserta keluarganya juga dapat meningkat. Upah dapat diberikan berdasarkan banyaknya waktu yang dikeluarkan untuk bekerja maupun satuan barang yang mampu dihasilkan pekerja. Upah minimum merupakan suatu bentuk usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berpendapatan kurang/ rendah. Dengan demikian, jika tingkat upah minimum yang diberikan semakin tinggi maka semakin tinggi pula pendapatan masyarakat tersebut sehingga

tingkat kesejahteraannya juga meningkat

Dalam penentuan kebijakan upah minimum didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: a) biaya kebutuhan hidup minimum; b) tingkat inflasi; c) upah minimum antar daerah; d) kondisi pasar kerja; e) pendapatan perkapita. Upah menjadi sumber utama penghasilan sebuah keluarga, sehingga besaran upah yang diterima diharuskan mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup baik pekerja maupun keluarganya.

Kebijakan upah minimum merupakan salah satu instrumen penting pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk mewujudkan keadilan dan persamaan hak pekerja dalam memenuhi kebutuhannya. Pengaruh upah minimum terhadap lapangan pekerjaan dapat dikategorikan menjadi dua kategori. Upah minimum telah menerima momentum pada kalangan pembuat kebijakan sebagai salah satu cara untuk mengontrol pertumbuhan upah dan ketimpangan pendapatan. Pertama, kenaikan upah minimum akan mengurangi lapangan kerja karena perusahaan menjadi enggan untuk menerima pekerja baru. Penelitian tentang dampak kebijakan upah minimum terhadap biaya menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara upah minimum dan pengangguran.

Kedua, semakin tinggi upah minimum akan meningkatkan lapangan kerja. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berdampak positif terhadap ketenagakerjaan, ketika upah lebih tinggi maka insentif bagi angkatan kerja akan lebih terampil (Indradewa & Natha, 2015).

Dijelaskan bahwa upah merupakan aspek penting bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan dan menjelaskan bahwa upah minimum dapat mendorong perekonomian secara keseluruhan. Ketika upah minimum berdampak positif maka permintaan output juga positif

Tingkat UMP ditentukan setiap tahun sesuai dengan cakupan gaji pemerintah yang penting untuk memastikan tingkat pertama yang berada dalam situasi kerja keras, produktivitas dan peningkatan ekonomi. Upah minimum biasanya ditetapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. UMP juga dapat ditentukan melalui cara penyelesaian bersama antara pengusaha dan pekerja, dengan syarat besaran upah tidak boleh kurang dari yang diputuskan melalui oleh pemerintah.

2.3 Teori Kependudukan Robert Malthus

Menurut Malthus pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dan dapat menyebabkan kemiskinan. Mankiw menyebutkan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dapat berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya alam sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam dapat berkurang manfaatnya, dan dapat menurunkan pendapatan perkapita. Menurunnya pendapatan perkapita disertai meningkatnya pertumbuhan penduduk dapat memberi pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja akibatnya pengelolaan SDA tidak baik.

2.4 Teori Kependudukan Michael Kremer

Menurut Kremer pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi teknologi. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak masyarakat yang dapat menghasilkan teknologi-teknologi baru. Hal ini berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sebab perusahaan dapat menggunakan teknologi terbaru guna meningkatkan hasil produksi barang dan atau jasa.

2.5 Investasi

Investasi merupakan pengeluaran penanam modal guna pembelian perlengkapan produksi serta barang-barang modal guna meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian, investasi diartikan kegiatan belanja guna peningkatan kapasitas produksi perekonomian. Investasi bertujuan untuk memaksimalkan tingkat produksi yang akan menghasilkan output atau surplus. Investasi dapat mempengaruhi permintaan agregat dan kapasitas produksi secara nasional. Investasi merupakan kegiatan menanam modal pada bermacam kegiatan perekonomian dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Investasi dibagi menjadi investasi dalam negeri (PMDN) yang dipengaruhi oleh swasta dan pemerintah dalam negeri, serta investasi asing (PMA) yang dipengaruhi oleh perusahaan maupun pemerintah luar negeri. Semakin besar investasi yang didapat maka semakin tinggi pula pertumbuhan sektor perekonomian pada pengalokasian SD yang

dimiliki yang dapat meningkatkan pendapatan bruto.

Investasi memberikan kontribusi positif terhadap tingkat lapangan kerja. Tingkat investasi dan upah berperan dalam penciptaan lapangan kerja. Investasi merupakan solusi yang sangat efektif untuk permasalahan ekonomi negara terutama bagi negara berkembang. Beberapa penelitian menemukan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berperan penting dalam ketenagakerjaan, meskipun jumlahnya masih terbatas dan berpengaruh positif terhadap ketenagakerjaan. Kebanyakan studi sebelumnya menunjukkan hubungan tidak langsung antara

investasi dalam negeri dan kesempatan kerja.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode analisis ECM (Error Correction Model) yang diolah menggunakan software E-views 10. Data yang digunakan adalah data time series, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari pihak ketiga dalam hal ini adalah BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 1990-2020.

Model dasar dalam penelitian ini adalah menggunakan Error Corretion Model oleh Engle-Granger:

$$Y = f (UMP, JMLDK, INV) \dots(1)$$

Dimana :

PTK = Penyerapan Tenaga Kerja

UMP = Upah Minimum Provinsi

JMLDK = Jumlah Penduduk

INV = Investasi (Penanaman

Modal Asing dan Penanaman

Modal Dalam Negeri)

Persamaan model jangka panjang dalam penelitian ini adalah:

$$PTK_t = \beta_0 + \beta_1 UMP_t + \beta_2 JMLDK_t + \beta_3 INV_t + \varepsilon_t \dots(2)$$

Dimana :

PTK = Penyerapan Tenaga Kerja

UMP = Upah Minimum Provinsi

JMLDK = Jumlah Penduduk

INV = Investasi (Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri)
 ε_t = Error Term

Persamaan model jangka pendek dalam penelitian ini adalah:

$$D(PTK_t) = \beta_0 + \beta_1 D(UMP_t) + \beta_2 D(JMLDK_t) + \beta_3 D(INV_t) + \beta_4 ECT_{t-1} \dots \dots \dots(3)$$

Dimana :

D(PTK) = Penyerapan Tenaga Kerja 2nd Difference

D(UMP) = Upah Minimum Provinsi 2nd Difference

D(JMLDK) = Jumlah Penduduk 2nd Difference

D(INV) = Investasi (Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri) 2nd Difference

ECT = Error Correction Term

4. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini telah memenuhi beberapa uji yang telah ditentukan yakni Uji Stasioneritas, Uji Kointegrasi, Uji ECM, serta Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji

Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, serta Uji Multikolinearitas. Hasil dari penelitian:

1. Uji Stationeritas

Tabel 5. Hasil Uji Stasioneritas Tingkat Level

Variabel	Nilai ADF	Nilai Kritis MacKinnon			Prob.	Ket.
		1%	5%	10%		
PTK	0.539024	-3.679322	-2.967767	-2.622989	0.9852	Non Stasioner
UMP	5.464142	-3.670170	-2.963972	-2.621007	1.0000	Non Stasioner
JMLDK	1.698996	-3.737853	-2.991878	-2.635542	0.9993	Non Stasioner
INV	5.272562	-3.689194	-2.971853	-2.625121	1.0000	Non Stasioner

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2021

Hasil Uji ADF Level, variabel-variabel non stationer di tingkat level. Ditunjukkan dengan nilai t-Statistic yang bernilai positif

dan nilai probabilitasnya lebih tinggi dari nilai 5% atau 0,05. Sehingga diperlukan uji selanjutnya yakni uji 1st Difference.

Tabel 6. Hasil Uji Stasioneritas Tingkat 1st Difference

Variabel	Nilai ADF	Nilai Kritis MacKinnon			Prob.	Ket.
		1%	5%	10%		
PTK	-6.531729	-3.679322	-2.967767	-2.622989	0.0000	Stasioner
UMP	-2.557108	-3.679322	-2.967767	-2.622989	0.1132	Non Stasioner
JMLDK	-1.635247	-3.689194	-2.971853	-2.625121	0.4520	Non Stasioner
INV	3.586112	-3.769597	-3.004861	-2.642242	1.0000	Non Stasioner

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2021

Hasil Uji ADF 1st Difference, variabel bekerja stasioner di tingkat 1st difference, sedangkan variabel-variabel lainnya non stationer di tingkat 1st difference. Ditunjukkan dengan nilai t-Statistic variabel bekerja yang bernilai negatif dengan probabilitas 0,0000 lebih rendah dari 5% atau 0,05 sedangkan t-Statistic variabel lainnya bernilai positif dengan probabilitas lebih tinggi dari nilai 5% atau 0,05,

diperlukan uji selanjutnya yakni uji 2nd Difference.

Tabel 7. Hasil Uji Stasioneritas Tingkat 2nd Difference

Variabel	Nilai ADF	Nilai Kritis MacKinnon			Prob.	Ket.
		1%	5%	10%		
PTK	-6.617235	-3.699871	-2.976263	-2.627420	0.0000	Stasioner
UMP	-7.161040	-3.689194	-2.971853	-2.625121	0.0000	Stasioner
JMLDK	-8.793858	-3.689194	-2.971853	-2.625121	0.0000	Stationer
INV	-7.947639	-3.699871	-2.976263	-2.627420	0.0000	Stasioner

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2021

Hasil Uji ADF 2nd Difference, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan stationer di tingkat 2nd difference. Ditunjukkan dengan

nilai t-Statistic yang bernilai negatif probabilitas $0,0000 < 5\%$ atau $0,05$. Sehingga variabel-variabel yang digunakan stasioner di tingkat 2nd Difference.

2. Uji Kointegrasi

Tabel 8. Hasil Uji Unit Root Test terhadap Residual Persamaan Jangka Panjang Tingkat Level

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.024818	0.0439
Test critical values:		
1% level	-3.670170	
5% level	-2.963972	
10% level	-2.621007	

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2021

Hasil Uji Kointegrasi, variabel-variabel yang digunakan berkointegrasi satu sama lain pada tingkat level. Ditunjukkan dengan nilai t-Statistic sebesar $-3,024818$ yang bernilai negatif dan probabilitas $0,0439$ lebih rendah dari nilai 5% atau $0,05$. Sehingga terdapat hubungan antara jumlah penduduk bekerja, upah minimum provinsi, jumlah penduduk, dan investasi (PMA dan PMDN) di provinsi D.I. Yogyakarta.

Persamaan Model Jangka Panjang

$$PTK_t = 2104612.52662 + 0.651799813472UMP_t - 0.199595695626JMLDK_t - 0.00990122217476INV_t + \varepsilon_t \dots (4)$$

Persamaan Model Jangka Pendek

$$D(PTK_t) = -4490.82843492 + 1.00623410778D(UMP_t) + 1.40092358238D(JMLDK_t) + 0.00466960553588D(INV_t) - 0.891116997771ECT_{t-1} \dots (5)$$

3. Uji Error Correction Model (ECM)

Persamaan Error Correction Model (ECM) yang dapat diambil adalah

Berdasarkan hasil uji ECM dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 9. Hasil Uji Error Correction Model (ECM) Jangka Panjang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
UMP	0.651800	0.108452	6.010029	0.0000
JMLDK	-0.199596	0.185521	-1.075864	0.2915
INV	-0.009901	0.004004	-2.472872	0.0200
C	2104613.	581017.1	3.622290	0.0012

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2021

Tabel 10. Hasil Uji Error Correction Model (ECM) Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D2_UMP	1.006234	0.263295	3.821700	0.0008
D2_JMLDK	1.400924	1.326208	1.056338	0.3013
D2_INV	0.004670	0.007253	0.643787	0.5258
RESID_ECT(-1)	-0.891117	0.223694	-3.983649	0.0005
C	-4490.828	11852.97	-0.378878	0.7081

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2021

- a. Pengaruh variabel UMP terhadap variabel Jumlah Penduduk Bekerja

Berdasarkan **Tabel 9. dan Tabel 10.** Hasil uji ECM, variabel UMP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel jumlah penduduk bekerja dalam jangka panjang. Dengan t-statistic yang bernilai positif (6.010029) dan nilai probabilitas (0.0000) < 5% atau 0,05. Sedangkan dalam jangka pendek variabel UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel jumlah penduduk bekerja. Nilai t-statistic yang bernilai positif (3.821700) dan nilai probabilitas (0.0008) < taraf signifikansi 5% atau 0,05.

- b. Pengaruh variabel Jumlah Penduduk terhadap variabel Jumlah Penduduk Bekerja

Berdasarkan **Tabel 9. dan Tabel 10.** Hasil uji ECM, variabel Jumlah Penduduk berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap variabel jumlah penduduk bekerja dalam jangka panjang ditunjukkan dengan t-statistic bernilai negatif (-1.075864) dan nilai probabilitas (0.2915) > taraf signifikansi 5% atau 0,05. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel jumlah penduduk bekerja dalam jangka pendek. Ditunjukkan t-statistic yang bernilai positif (1.056338) dan nilai probabilitas (0.3013) > taraf signifikansi 5% atau 0,05.

- c. Pengaruh variabel Investasi terhadap variabel Jumlah Penduduk Bekerja

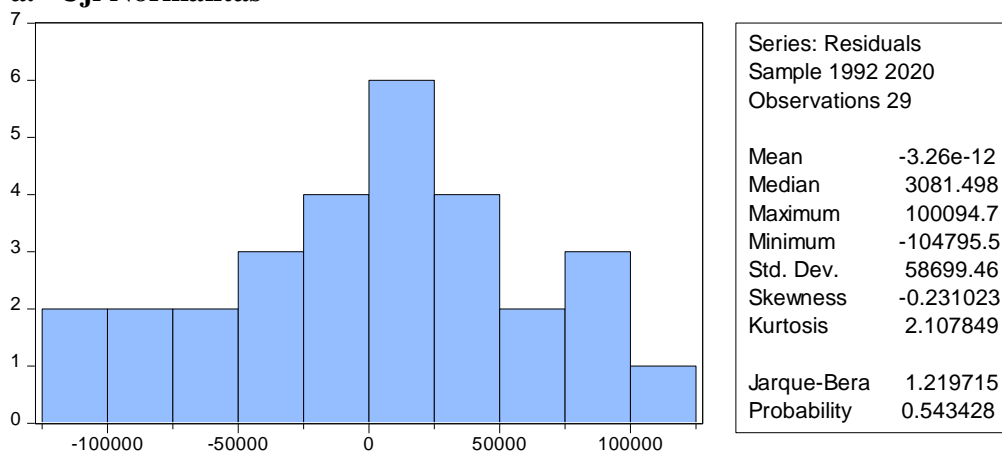
Berdasarkan **Tabel 9. dan Tabel 10.** Hasil uji ECM,

variabel Investasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap variabel jumlah penduduk bekerja dalam jangka panjang. Ditunjukkan dengan nilai t-statistic (-2.472872) dan probabilitas (0.0200) < taraf signifikansi 5% atau 0,05. Variabel Investasi berpengaruh

secara positif dan tidak signifikan terhadap variabel jumlah penduduk bekerja dalam jangka pendek. Ditunjukkan dengan t-statistic yang bernilai positif (0.643787) dan nilai probabilitas (0.5258) > taraf signifikansi 5% atau 0,05.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2021

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas tidak terdapat masalah normalitas. Dapat dilihat dari angka Jarque-Bera sebesar 1.219715 > taraf signifikansi 5% atau 0.05

sehingga data terdistribusi secara normal. Serta angka probabilitas sebesar 0.543428 > dari taraf signifikansi 0,05 atau 5%.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.528502	Prob. F(4,24)	0.7159
Obs*R-squared	2.347638	Prob. Chi-Square(4)	0.6721
Scaled explained SS	0.890652	Prob. Chi-Square(4)	0.9259

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2021

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa Prob. Chi-Square 0.6721 > taraf

signifikansi 0,05 atau 5%. Sehingga tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 12. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	1.979423	Prob. F(2,22)	0.1620
Obs*R-squared	4.422636	Prob. Chi-Square(2)	0.1096

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2021

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa Prob. Chi-Square sebesar 0.1096 > signifikansi 0,05 atau 5%. Sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data.

d. Uji Multikolinearitas

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
D2_UMP	0.069324	1.083455	1.074008
D2_JMLDK	1.758827	1.049022	1.045289
D2_INV	5.26E-05	1.148492	1.148492
RESID_ECT(-1)	0.050039	1.074959	1.072712
C	1.40E+08	1.013532	NA

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2021

Hasil perhitungan uji multikolinearitas menunjukkan bahwa Centered VIF yang menunjukkan angka <10. Sehingga tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

5. Kesimpulan

Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) jangka panjang maupun jangka pendek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel Jumlah Penduduk dalam jangka panjang berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan dalam jangka pendek variabel Jumlah Penduduk berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel Investasi dalam jangka panjang berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan dalam jangka pendek variabel Investasi

berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Referensi

Atiyatna, D. ., Muhyiddin, N. ., & Soebyakto, B. . (2016). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 8–21.

Azhari, A. (2021). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor UMKM di Indonesia : Pendekatan Error*

- Correction Model Factors affecting Labor Absorption on the MSME Sector in Indonesia : Error Correction Model Approach.* 12(28). <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i1.2435>
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (n.d.). *No Title.*
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (n.d.). Catalog : 1101001. *Statistik Indonesia 1990-2020, 1101001,* 790. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Dasri Lokiman, D. C. R. dan A. Y. L. (2014). Pengaruh Upah Minimum Provinsi (Ump) Dan Investasi Swasta Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Dampaknya Pada Pdrb (Adhk) Di Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(01), 43–61.
- Indradewa, I., & Natha, K. (2015). Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(8), 923–950.
- Pangastuti, Y. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah. *Jurnal Economic Development Analysis*, 4(2), 203–211.
- Putri, A. N., & Soelistyo, A. (2018). *Analisis Pengaruh Upah, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Gerbangkertasusila Tahun 2012-2016.* 2(3), 357–371.
- Rahayu, Y. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi JAMBI. *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Jambi*, 7(2), 188–202.
- Rochmani, T. S., Purwaningsih, Y., & Suryantoro, A. (2018). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri.* 16(2), 51–52.
- Setiawan, D., Maulida, Y., & Sandika, R. S. (2014). Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(2), 1–16.